

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KARAWANG

Yana Wijaksana¹, Lukmanul Hakim², Lina Aryani³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
e-mail: yanawijaksanakarawang@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan mengakibatkan masyarakat tidak dapat memiliki tempat tinggal dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer maupun sekunder, banyaknya perusahaan dan kawasan industri pun tidak dapat menjamin menjadikan masyarakat disekitarnya memiliki pendapatan dan pekerjaan yang layak, yang terjadi malah sebaliknya, permasalahan lainnya tentunya pada bidang pendidikan, masih cukup rendah pula pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat kabupaten karawang khususnya pada daerah pesisir dan pelosok yang sangat minim akan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, Metode penelitian pada kali ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana datanya peneliti dapatkan dari studi literatur dengan melihat fenomena dan data serta artikel terdahulu yang membahas tentang permasalahan tersebut yang kemudian dianalisis menggunakan metode triangulasi data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan. Dan hasil yang peneliti dapatkan adalah masih kurangnya peran Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis akibatnya setiap tahun terus bertambah tanpa adanya program yang dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Peran, Kemiskinan, Penanggulangan, Gelandangan dan Pengemis

Abstract

Poverty results in people not being able to have a place to live and sufficient income to meet their daily needs, both primary and secondary needs, the large number of companies and industrial areas cannot guarantee that the surrounding community will have a decent income and work, what happens is the opposite, other problems Of course, in the field of education, the education received by the people of Karawang Regency is still quite low, especially in coastal and remote areas where the facilities and infrastructure that support education are very minimal. The research method this time was to use a descriptive qualitative method where the data the researcher got from the study. literature by looking at phenomena and data as well as previous articles discussing these problems which were then analyzed using the data triangulation method, namely Data Reduction, Data Presentation and Conclusions. And the results that the researchers got were that there was still a lack of role for the Social Services in dealing with the problem of homelessness and beggars, as a result, it continued to increase every year without a program that could run well.

Keywords: Role, Poverty, Overcoming, Homelessness and Beggars

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait kemiskinan sangat sulit untuk diatasi, dengan banyaknya masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata, karenanya masyarakat tersebut tidak memiliki tempat tinggal yang layak di daerah perkotaan dan pekerjaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kabupaten karawang dikenal sebagai kota padi bahkan sebagai kota industri yang memiliki kawasan industri yang sangat luas dan terbesar secara nasional tak ayal biaya hidup khususnya di daerah perkotaan karawang sangatlah tinggi, tidak sebanding dengan banyaknya perusahaan dan kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang dengan masyarakatnya yang masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak di tanahnya sendiri. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang program apa yang seharusnya diberikan dan program apa yang salah.

Kota merupakan suatu wilayah yang pemukimannya relatif besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang-orang yang beraneka ragam kedudukan sosialnya. Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan tidak seimbang dengan ruang yang ada dan peluang pekerjaan di perkotaan. Hal ini yang menjadi permasalahan di kota. Persaingan hidup yang keras di perkotaan, membuat mereka yang tidak

memiliki keterampilan ataupun tingkat pendidikan yang tinggi akan kehilangan peluang untuk mendapatkan penghidupan sebagaimana semestinya. Ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya bisa disebabkan karena keadaan fisik yang cacat, keterampilan terbatas, pendidikan yang rendah, bahkan tidak adanya ruang gerak bagi mereka untuk berkreasi dan berinovasi.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Karawang. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1,936 juta orang, naik sebanyak 110,50 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,227 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 708,61 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1,117 juta orang penduduk yang bekerja dan 109,89 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 31,44 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 39,56 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 8,11 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 63,40 persen, turun 2,12 persen poin dibandingkan Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. (BPS Karawang, 2023)

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 39,27 persen. Sementara penduduk bekerja tamatan diploma I/II/III dan universitas sebesar 9,79 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan mengalami sedikit perbedaan pola dengan Agustus 2022. Dibandingkan dengan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III dan Universitas (Diploma IV, S1, S2, S3) mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 4,57 persen poin, 0,60 persen poin, dan 0,76 persen poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan tamatan SD ke bawah (tidak/ belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan persentase, dengan penurunan persentase masing-masing sebesar 2,64 persen poin, 1,16 persen poin, dan 2,14 persen poin (BPS Kabupaten Karawang, 2023), berikut gambarannya:



Kondisi sosial-ekonomi manusia gerobak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, merupakan permasalahan yang hendak kita selesaikan bersama. Masalah manusia gerobak bukan hanya menjadi masalah bagi pemerintah akan tetapi menjadi masalah bagi kita semua sebagai saudara dalam kemanusiaan untuk mengatasi kondisi masalah sosial manusia gerobak agar dapat menjalani hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Satpol PP Kabupaten Karawang menyebabkan permasalahan gelandangan manusia gerobak di Karawang belum teratasi dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya program secara khusus yang dimiliki oleh Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang sendiri memiliki produk hukum yang secara jelas mengatur gelandangan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Pemerintah dapat menertibkan gelandangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15a bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban terhadap Tuna

Sosial dan anak jalanan yang berada ditempat umum. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menertibkan gelandangan yakni dengan cara: Program Pemberdayaan sosial ekonom melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan baik secara sistem panti maupun non panti; Memberikan bantuan sosial; dan Melakukan pemulangan ke daerah asalnya.

Dinas Sosial melakukan beberapa program dalam pelayanan di bidang sosial. Akan tetapi pada merealisasikan program terdapat berbagai macam permasalahan baik itu internal maupun eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target dari program-program pelayanan kesejahteraan sosial bahwa pencapaian yang di targetkan oleh Dinas Sosial terhadap Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sebanyak 100% akan tetapi pada pelaksanaannya hanya tercapai 4,87% sangat rendah dan sangat jauh dari target seharusnya.

Selain itu, permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang yakni faktor eksternal dimana masih terbatasnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai fungsi dukungan terhadap penanggulangan PMKS. Dimana PSKS merupakan barisan terdepan ditengah-tengah masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial dilingkungannya sendiri. Sehingga menyebabkan kurang teratasinya masalah-masalah sosial seperti gelandangan yang membawa gerobak di Kabupaten Karawang.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang yang dibuat dalam menangani masalah gelandangan serta pengemis yaitu (Peraturan Daerah Nomor: 8 Tahun 2012) tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk melakukan pembinaan oleh Dinas Sosial memerlukan rumah singgah untuk menampung gelandangan serta pengemis agar tidak ada lagi yang menggelandang atau mengemis dipinggir jalan. Sementara ini, untuk kegiatan pembinaan, bimbingan serta pelatihan bagi gelandangan dan pengemis dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Bina Karya Kabupaten Karawang terdapat panti yang dimana panti tersebut dipisah untuk laki-laki dengan perempuan.

Istilah gelandangan atau pengemis seringkali disingkat "gepeng". Penduduk di Indonesia sudah sangat kenal dengan singkatan "gepeng" tersebut, dimana tidak hanya menjadi kosakata secara umum untuk percakapan sehari-hari, namun juga menjadi pemberitaan di berita-berita dan menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah pada kelompok orang-orang tertentu yang sering kita jumpai di tempat kota besar tentang adanya keberadaan gelandangan maupun pengemis yang tidak punya suatu pekerjaan atau biasa sering disebut tunawisma. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980), gelandangan ialah suatu orang yang hidup dengan kondisi tidak sesuai dengan norma kehidupan yang secara layak di masyarakat, dan juga tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang menetap. Sedangkan, pengemis ialah suatu orang yang dapat penghasilan dengan cara meminta atau mengemis di tempat umum supaya mendapatkan rasa iba dari orang lain.

Menurut Kartono (2003), Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adatistiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah lakuumum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. dengan demikian Pengemis dan gelandangan dapat disebut sebagai suatu patologi sosial.

Pendidikan tentunya menjadi hal penting bagi masyarakat untuk dapat bersaing, jika memang permasalahannya pada pendidikan seharusnya pemerintah daerah kabupaten karawang meningkatkan di bidang pendidikan agar bisa menanggulangi gelandangan dan pengemis agar nantinya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak program pembinaan dan juga pemebrian sosialiasi kepada gelandangan. Menurut Hamalik (2007: 33) peran adalah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkah tingkah seseorang yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran yaitu suatu pola tingkah laku yang merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki seseorang sebagai pekerjaan atau jabatan yang berkedudukan dimasyarakat.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori peran dari Dinas Sosial dalam mennggulangi gelandangan dan pengemis yang ada di daerah perkotaan khususnya di kabupaten karawang.

METODE

Metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2021: 18) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2021: 296) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data Studi Pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan pengumpulan data dari hasil studi literatur atau buku-buku, artikel-artikel serta media online yang memberikan informasi terkait dengan pengulangan gelandangan dan pengemis di kota karawang dengan menggunakan metode analisis Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021: 323) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (reduksi data), display data (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pengumpulan data secara studi pustaka dan literatur review yang sudah peneliti lakukan dengan melihat fenomena dan program dari dokumen Dinas Sosial itu sendiri, dalam hal pendidikan masih saja kurang, pemberian pelayanan pendidikan masih belum merata dan pada praktiknya untuk pemberian pendidikan dan sosialisasi ini dilakukan tidak secara terus menerus atau tidak dilakukan 5-6 hari dalam seminggu karena kekurangan SDM yang ada, untuk saat ini pendidikan seharusnya seera dapat diberikan secara maksimal karena tuntutan pekerjaan yang memaksa masyarakat agar mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak hanya itu kemampuan yang ada di dalam diri pun harus dikembangkan agar kita bisa memiliki keterampilan yang berguna dan tentunya menghasilkan pendapatan dan menghidupi diri dan keluarga di masa mendatang.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan pada penelitian kali ini belum adanya peran dinas sosial dalam menunjang atau memberikan pelayanan pendidikan dan sosialisasi yang baik, terbukti untuk sampai saat ini menurut peneliti tidak ada dari program dinas sosial yang dapat berjalan dengan baik terhadap penanggulangan gelandangan dan kemiskinan, tentunya harus menggunakan cara yang baik dan humanis juga dalam menertibkan gelandangan dan pengemis serta memberikan pengarahan yang dapat di pahami dengan mudah bagi mereka.

SARAN

Menurut peneliti Dinas Sendiri jangan terlalu banyak memberi barang yang sudah jadi seperti uang dan sembako seharusnya itu dapat dijadwalkan agar tidak terus menerus diberikan yang nantinya masyarakat pun akan malas bekerja dan berusaha dengan selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah serta memberikan sosialisasi dengan humanis dan pelayanan pendidikan yang merata

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmadani, F. N. (2023). PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Hidayat, A., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas program penanggulangan dan pemberdayaan dinas sosial dalam mengatasi gelandangan. *Jurnal Manajemen*, 13(3), 348-354.
- HS, Y. T., & Kristian, I. (2021). Model Collaborative Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Garut. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(3), 69-81.
- Indriyani, I., Sungkono, S., & Karnama, M. M. (2022). Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), 132-141.
- Ratni, Q. W., & Priyanti, E. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang. *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, 3(2), 34-41.

- Sari, D. (2017, December). Peran orang tua dalam memotivasi belajar siswa. In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
- Safira, R., & Pura, M. H. (2022). ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(1), 32-41.
- Sugiyono, D. (2021). In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang 2023